



LAMPAUI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DPRD Kota Yogyakarta Desak Reformasi Total Tata Kelola dan Kinerja OPD



YOGYA (KR) - Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), lembaga dewan tersebut menyerukan reformasi mendalam terhadap tata kelola dan kinerja perangkat daerah.

Langkah tegas ini diambil untuk menyelaraskan kualitas pembangunan dengan capaian administratif, menyusul adanya 'jurang' evaluasi antara raihan opini WTP dari BPK RI dengan realitas permasalahan di lapangan.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi, menyebut meski Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan namun pihaknya menilai dokumen pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2025 tersebut masih terjebak pada fungsi administratif dan belum menyentuh substansi permasalahan warga.

Menurut Marwoto Hadi, dalam nota rekomendasi yang telah ia sampaikan dalam rapat paripurna pekan lalu, pihaknya menyoroti bahwa serapan anggaran yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kualitas belanja yang optimal.

"Kami melihat laporan ini belum sepenuhnya menjadi instrumen evaluasi berbasis hasil (outcome),"



Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Yogyakarta, Marwoto Hadi.

Serapan anggaran saat ini masih berorientasi pada output administratif, sehingga belum mencerminkan solusi nyata atas dinamika sosial di masyarakat," ujar Marwoto Hadi.

Pansus mengidentifikasi adanya pola permasalahan yang cenderung berulang. Hal ini ditengarai akibat lemahnya kemampuan antisipatif perangkat daerah serta tindak lanjut rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang dinilai tidak berjalan efektif.

Sorotan Sektor Fundamental; Sampah hingga Pendidikan

DPRD memberikan catatan kritis pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Pada aspek darurat sampah dan tata ruang, pihaknya mendorong penyusunan grand design pengelolaan sampah berbasis sumber dan penegakan hukum tata ruang yang tanpa pandang bulu.

Kemudian aspek pendidikan, Marwoto menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap kasus penahanan ijazah dan tunggakan SPP, serta perluasan

kuota afirmasi bagi warga asli Yogyakarta. Sedangkan aspek kesehatan, keterbatasan fasilitas laboratorium daerah dan lemahnya publikasi layanan publik menjadi poin yang harus segera dibenahi oleh

dinas terkait.

Digitalisasi Aset dan Disiplin Blokrasi

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Organi-

sasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus juga memperketat pengawasan terkait tata kelola aset. Marwoto menegaskan bahwa disiplin pencatatan aset adalah indikator utama tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini tengah mengembangkan fitur kontrol otomatis pada aplikasi Simbada. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali data secara real-time, guna memastikan akurasi laporan keuangan dan meminimalisir temuan berulang terkait administrasi barang milik daerah.

Di sektor pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta mengurai sumbu izin reklame dan bangunan demi menjaga iklim investasi. Sementara Din-dukcapil memastikan verifikasi data ganda NIK terus

berjalan dengan tetap memprioritaskan perlindungan data pribadi.

Evaluasi BUMD dan Persiapan UU HKPD 2027

Sektor usaha daerah juga tak luput dari bidikan. Pansus merekomendasikan agar penyertaan modal kepada BUMD wajib berbasis kinerja dan rencana bisnis yang terukur.

Bank BPD DIY mendapat apresiasi atas capaian modal yang melampaui target. Kemudian PDAM Tirtamarta dan Jogjatama Vishesha (XT Square) didorong melakukan inovasi bisnis agar aset yang dikelola lebih produktif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reformasi tata kelola ini dipandang krusial sebagai langkah persiapan menyongsong implementasi penuh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 ten-

gung Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2027 mendatang.

Harapan Dampak Nyata

DPRD berharap melalui rekomendasi tajam ini, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lagi berpuas diri hanya dengan predikat WTP di atas kertas. Seluruh perangkat daerah kini diwajibkan menyusun rencana aksi terukur untuk memastikan setiap rupiah dari modal daerah memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi lokal.

"Penguatan sistem digital dan optimalisasi aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan masyarakat merasakan dampak pembangunan yang lebih nyata," tutup Marwoto. (Dhi)



Rapat pembahasan Pansus LKPJ DPRD Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005